

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis deskriptif, rasio kemandirian kab/kota di Provinsi Jambi periode 2016- 2023, rasio kemandirian terendah tercatat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan rata-rata 5,88%, yang tergolong rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Sementara itu, rasio kemandirian tertinggi terdapat di Kota Jambi dengan rata-rata 35,40% yang tergolong rendah dengan pola hubungan konsultatif. Adapun rata-rata rasio keserasian belanja di kab/kota di Provinsi Jambi selama periode yang sama adalah 21,43% dan tergolong kategori kurang serasi, dengan rata-rata tertinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 30,45% (kurang serasi) dan terendah di Kabupaten Bungo sebesar 12,43% (tidak serasi).
2. Berdasarkan hasil regresi diperkirakan bahwa *trend* rasio kemandirian dan *trend* rasio keserasian belanja kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2024- 2028 mengalami pertumbuhan yang positif. Rata-rata *trend* KKD tertinggi di Kota Jambi sebesar 112,14% (delegatif) dan terendah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 17,81% (instruktif). Kemudian rata-rata *trend* RBM tertinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 45,97% (cukup serasi) dan terendah di Kabupaten Bungo sebesar 18,22% (tidak serasi).
3. Berdasarkan hasil regresi dengan model terbaik FEM didapatkan bahwa Rasio Kemandirian dengan nilai Prob. sebesar $0,45 > 0,05$, artinya KKD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Provinsi Jambi. Sedangkan Rasio Keserasian Belanja memiliki Prob. sebesar $0,01 < 0,05$, artinya RBM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

6.1 Saran

1. Pemerintah daerah Provinsi Jambi khususnya di wilayah kabupaten/kota diharapkan dapat lebih optimal dalam peningkatan kualitas kinerja keuangan daerah dan merancang kebijakan yang cermat dan tepat sasaran pada sektor-

sektor produktif di wilayahnya. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan sehingga jumlah PAD bisa lebih baik kedepannya dan dapat mengurangi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat. Kemudian alokasi belanja daerah yang semakin tinggi pada APBD, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan alokasi anggaran yang baik agar dana yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian sehingga dapat mendorong produktivitas penduduk dan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Dapat menambahkan variabel-variabel lain yang lebih berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai perluasan dan pendalaman mengenai topik penelitian ini.